



POTENSI NEGARA ASEAN BERGABUNG DALAM KEANGGOTAAN BRICS UNTUK MENERAPKAN EKONOMI SYARIAH ISLAM: PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI ALAT TUKAR PERDAGANGAN

Achmad Mirza Apriansyah, Rudy Sutanto, Agus Adriyanto

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Abstrak

Penerapan ekonomi syariah dan potensi penggunaan mata uang emas dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pertahanan ekonomi global saat ini. Aliansi BRICS yang terdiri dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat, seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, telah menjadi kekuatan signifikan dalam upaya mendorong reformasi ekonomi global, salah satunya melalui dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan pada dolar AS. Di sisi lain, ASEAN, yang dipimpin oleh negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki populasi muslim terbesar, memiliki peluang besar untuk mengusulkan penggunaan emas sebagai alat pembayaran alternatif dalam perdagangan internasional, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penggunaan emas yang stabil dan bebas dari spekulasi, seperti yang telah terbukti di Kuwait dengan dinar emasnya yang kuat, memberikan contoh nyata bagaimana negara dapat mengurangi risiko ekonomi global yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang fiat. Melalui forum-forum ekonomi ASEAN seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), usulan ini dapat disosialisasikan dan diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara BRICS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penggunaan mata uang emas dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan politik di kawasan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menelaah bagaimana integrasi ekonomi dapat berkontribusi pada penguatan pertahanan ekonomi regional. Berdasarkan kajian literatur, penerapan mata uang emas sebagai alat tukar yang stabil dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Mata Uang Emas, ASEAN, BRICS, Pertahanan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkembangan geopolitik global saat ini menempatkan negara-negara dalam posisi yang semakin kompleks, di mana pertahanan ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang harus diperkuat. Salah satu aliansi yang semakin mengemuka dalam konteks ini adalah BRICS, yang kini merambah wilayah ASEAN melalui kerja sama ekonomi BRICS-ASEAN. Dikutip dan dikembangkan dari BRICS Portal (2024), BRICS adalah akronim yang mengacu pada kelompok negara dengan ekonomi berkembang pesat, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang menjadi wadah kerja sama ekonomi dan politik untuk meningkatkan pengaruh global serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengaruh yang dibawa oleh BRICS dalam kerangka ekonomi global tidak dapat diabaikan, terutama dalam upaya mereka menghindari dominasi dolar AS melalui rencana penggunaan mata uang negara masing-masing atau cryptocurrency dalam perdagangan internasional.

Namun, dalam konteks BRICS-ASEAN, ASEAN yang mana ketua ASEAN adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengusulkan penggunaan emas sebagai alternatif alat tukar yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai alat bayar perdagangan. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menghindari volatilitas yang sering terkait dengan cryptocurrency, yang dapat membawa risiko ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggota.

Penerapan ekonomi syariah di negara-negara ASEAN dalam konteks BRICS-ASEAN bukan hanya berdampak ekonomi belaka, tetapi juga terkait erat dengan pertahanan ekonomi negara-negara tersebut. Hal ini penting mengingat sejarah menunjukkan bahwa dominasi mata uang tertentu dalam perdagangan internasional sering kali menjadi alat kekuasaan yang digunakan oleh negara-negara besar untuk mempertahankan hegemoninya. Misalnya, dominasi dolar AS dalam perdagangan global telah memberikan Amerika Serikat keunggulan strategis, yang sering kali dimanfaatkan untuk mengendalikan ekonomi negara lain (KLEIN & PETTIS, 2020). Dalam konteks ini, penerapan ekonomi syariah yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan.

BRICS-ASEAN Chamber of Commerce berperan sebagai jembatan antara negara-negara BRICS dan ASEAN, memfasilitasi aliansi strategis yang dapat mendukung pengembangan ekonomi ASEAN melalui berbagai bentuk kerja sama seperti perdagangan, investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pasca Covid-19, ketika ekonomi global menghadapi ketidakpastian besar, kemitraan dengan BRICS dipandang sebagai langkah taktis yang tepat untuk memperkuat ekonomi ASEAN.

Meskipun saat ini negara-negara ASEAN berada dalam kondisi yang relatif damai, ketergantungan pada mata uang seperti dolar AS atau cryptocurrency yang berfluktuasi dan tidak memiliki dasar yang stabil dalam aset nyata membawa risiko tersendiri. Fluktuasi

nilai cryptocurrency yang sangat tinggi dan tidak adanya kontrol yang jelas oleh otoritas keuangan global dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak luas pada negara-negara yang bergantung pada alat tukar ini. Di sisi lain, penggunaan dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional sering kali diiringi dengan kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara asal mata uang tersebut, sementara negara-negara lain harus menanggung beban ketidakstabilan ekonomi global yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut (Stiglitz, 2016).

Penguasaan perdagangan oleh negara-negara yang mengendalikan mata uang global bukan hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Kendali atas mata uang utama, seperti dolar AS, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkan kebijakan ekonomi internasional, terutama karena negara-negara yang memegang mata uang ini dapat mempengaruhi arus perdagangan dan stabilitas keuangan global. Kontrol atas mata uang global tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga meningkatkan kekuatan geopolitik sebuah negara, karena keputusan moneter dan keuangan internasional dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan strategis negara tersebut.

Di sisi lain, munculnya cryptocurrency sebagai alternatif alat tukar menantang dominasi mata uang tradisional dan membuka peluang bagi negara-negara untuk lebih mandiri dalam kebijakan ekonomi mereka. Ini adalah bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas, di mana kontrol ekonomi dapat menjadi alat untuk meningkatkan pengaruh global tanpa menggunakan kekuatan militer langsung. Geopolitik mata uang dan teknologi keuangan baru ini semakin menunjukkan bahwa kendali ekonomi memainkan peran kunci dalam

membentuk dinamika kekuatan global dan tatanan internasional.

Dalam konteks BRICS-ASEAN, usulan ASEAN untuk menerapkan ekonomi syariah yang mempromosikan dalam konteks penggunaan emas sebagai alat tukar masa depan menawarkan alternatif yang tidak hanya lebih stabil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Penggunaan emas sebagai alat tukar dapat membantu negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang global yang dikendalikan oleh negara-negara besar, dan dengan demikian, memperkuat pertahanan ekonomi mereka di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Implikasi dari penerapan ekonomi syariah dalam konteks BRICS-ASEAN, khususnya dalam bidang perdagangan akan terkait dengan pertahanan ekonomi. Kajian ini mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana emas dapat digunakan secara efektif sebagai alat tukar yang memenuhi syarat-syarat syariah, bagaimana negara-negara ASEAN dapat berkolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan ini, serta bagaimana penerapan ini dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan politik di kawasan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi pertahanan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti tanpa bergantung pada pengujian hipotesis. Metode kualitatif dipilih karena fokusnya pada eksplorasi fenomena sosial secara rinci, melalui

pengumpulan data yang memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok memberikan makna terhadap suatu isu sosial atau peristiwa tertentu (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini sering digunakan untuk meneliti perilaku manusia, pola interaksi sosial, serta dinamika sosial dan budaya. Dengan demikian, metode ini sangat sesuai untuk penelitian yang meneliti perkembangan sosial dan budaya dalam konteks tertentu.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai fenomena yang sedang diteliti. Deskriptif adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena tanpa memanipulasi variabel, sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi di lapangan (Sandelowski, 2000). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur yang sudah ada, tanpa memerlukan pengumpulan data langsung di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi langkah-langkah yang diadaptasi dari proses analisis data kualitatif, yang meliputi pengumpulan data, penyaringan data, pengkodean, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2006). Setelah data dikumpulkan melalui studi pustaka, peneliti melakukan penyaringan atau kondensasi data, di mana informasi yang relevan dipilih, disederhanakan, dan dikelompokkan

untuk mempermudah analisis. Setelah itu, data yang telah diproses disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi maupun visualisasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menganalisis temuan yang ada untuk memberikan interpretasi dan kesimpulan dari fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRICS adalah aliansi ekonomi dan politik yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama negara-negara anggotanya dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan keseimbangan kekuatan internasional. Dikutip dan dikembangkan dari cirsd.org dijelaskan bahwa BRICS berfokus pada peningkatan perdagangan antaranggota, memperkuat infrastruktur ekonomi, mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan global, serta mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, forum ini juga mengupayakan reformasi institusi keuangan global, seperti IMF dan Bank Dunia, untuk lebih mencerminkan kepentingan negara berkembang. Melalui kolaborasi ini, BRICS berperan sebagai platform untuk mengatasi isu-isu penting seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan teknologi inovatif.

Agenda ekonomi BRICS berfokus pada meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi, dan keuangan antarnegara anggota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu langkah penting adalah pendirian New Development Bank (NDB), yang dirancang untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dan proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Melalui NDB, BRICS berupaya mempercepat investasi dalam sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan teknologi, dengan

tujuan mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan tradisional seperti IMF dan Bank Dunia. Selain itu, BRICS juga berusaha mempromosikan perdagangan dalam mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menstabilkan sistem keuangan global.

Selain aspek keuangan, BRICS juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mencakup pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta peningkatan kesejahteraan sosial di negara anggotanya. Kerjasama ekonomi ini juga mencakup inisiatif dalam memperluas perdagangan bebas di antara negara-negara BRICS, yang diharapkan dapat membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi ekonomi mereka di panggung global. BRICS juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dan digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, di mana negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan energi terbarukan, guna memastikan daya saing ekonomi jangka panjang.

Dikutip dari sumber yang sama agenda dedolarisasi BRICS bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional dan transaksi keuangan di antara negara-negara anggota. BRICS memandang dominasi dolar dalam sistem keuangan global sebagai sumber ketidakstabilan, khususnya bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar dan kebijakan moneter AS. Melalui upaya dedolarisasi, BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, menciptakan sistem pembayaran alternatif seperti BRICS Payment System, serta meningkatkan cadangan emas sebagai langkah diversifikasi cadangan devisa. Tujuan akhirnya adalah membangun arsitektur keuangan global yang lebih

adil dan seimbang, yang tidak terlalu bergantung pada dolar, sehingga negara-negara anggota dapat memperkuat kedaulatan ekonomi mereka dan mengurangi risiko eksternal dari kebijakan ekonomi negara-negara maju.

Dalam Teori Integrasi Ekonomi dijelaskan bahwa proses di mana negara-negara yang berbeda secara bertahap mengurangi hambatan perdagangan dan berusaha untuk mencapai tingkat kerjasama ekonomi yang lebih tinggi. Integrasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan lebih efisien, memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan mengurangi biaya transaksi antarnegara. Proses ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti perjanjian perdagangan bebas hingga tahap yang lebih kompleks seperti serikat pabean, pasar bersama, dan akhirnya integrasi penuh dalam bentuk serikat ekonomi.

Teori integrasi ekonomi sendiri dikembangkan oleh Bela yang membedakan beberapa tahapan integrasi ekonomi, termasuk kawasan perdagangan bebas, serikat pabean, pasar bersama, dan serikat ekonomi. Kawasan perdagangan bebas adalah bentuk dasar dari integrasi ekonomi di mana negara-negara anggota sepakat untuk menghapus tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan antaranggota, namun mereka masih mempertahankan kebijakan perdagangan eksternal mereka masing-masing terhadap negara-negara non-anggota (Balassa, 2013)

Serikat pabean adalah tahap selanjutnya dari integrasi ekonomi, di mana negara-negara anggota tidak hanya menghapuskan hambatan perdagangan antarnegara, tetapi juga mengadopsi kebijakan perdagangan eksternal yang seragam. Serikat pabean memungkinkan negara-negara anggota untuk memperkuat koordinasi ekonomi mereka dan memudahkan aliran barang

dan jasa di dalam wilayah serikat. Lebih lanjut, pasar bersama menambahkan dimensi lain dalam integrasi dengan memungkinkan aliran bebas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan barang. Dalam pasar bersama, tidak hanya barang dan jasa yang bebas bergerak di antara negara-negara anggota, tetapi juga tenaga kerja dan modal, sehingga menciptakan integrasi yang lebih mendalam. Pasar bersama memungkinkan negara-negara anggota untuk bersaing secara lebih efektif di pasar internasional, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (El-Agraa, 2011).

Tahap tertinggi dari integrasi ekonomi adalah serikat ekonomi, di mana negara-negara anggota tidak hanya mengintegrasikan pasar barang, jasa, dan faktor-faktor produksi, tetapi juga menyelaraskan kebijakan ekonomi mereka secara keseluruhan. Dalam serikat ekonomi, negara-negara anggota sering kali berbagi mata uang yang sama dan mengadopsi kebijakan fiskal serta moneter yang terkoordinasi. Uni Eropa menjadi contoh utama dari serikat ekonomi, di mana sebagian besar negara anggotanya menggunakan mata uang Euro dan mengikuti kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Integrasi pada level ini membutuhkan tingkat koordinasi yang sangat tinggi dan komitmen politik yang kuat di antara negara-negara anggota (Grauwe, 2020).

Salah satu alasan utama negara-negara berpartisipasi dalam integrasi ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Dengan menghapus hambatan perdagangan, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan menghasilkan barang dan jasa secara lebih efisien. Selain itu, integrasi ekonomi meningkatkan daya saing internasional, menarik lebih

banyak investasi asing langsung (FDI), dan memberikan akses yang lebih besar ke pasar global. Di sisi lain, integrasi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pengaturan kebijakan nasional yang harus disesuaikan dengan kepentingan kolektif negara-negara anggota. Dalam konteks ini, integrasi ekonomi membutuhkan kerjasama politik yang erat untuk menyelesaikan potensi konflik dan ketegangan antarnegara anggota (Baldwin & Wyplosz, 2022)

Secara keseluruhan, Teori Integrasi Ekonomi memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana negara-negara dapat bekerjasama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penghapusan hambatan perdagangan dan peningkatan integrasi pasar. Meskipun proses integrasi ekonomi tidak selalu mulus dan membutuhkan komitmen yang kuat dari negara-negara anggota, teori ini tetap relevan dalam konteks globalisasi ekonomi modern.

Kerjasama antara ASEAN dan BRICS merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan diplomatik di antara negara-negara berkembang. Kedua blok ini memiliki tujuan yang serupa dalam mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. ASEAN, yang merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, menawarkan pasar yang dinamis dan potensi investasi, sementara BRICS, khususnya Tiongkok dan India, memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang besar. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, infrastruktur, serta reformasi institusi global untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Salah satu contoh penting adalah inisiatif Belt and Road yang dipimpin

oleh Tiongkok, yang memfasilitasi pembangunan infrastruktur di negara-negara ASEAN, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS lainnya (Shambaugh, 2013). Selain itu, melalui forum-forum seperti BRICS-ASEAN Business Council, kedua blok ini terus meningkatkan dialog dan kolaborasi dalam perdagangan dan investasi.

Kerjasama perdagangan antara ASEAN dan BRICS terus berkembang seiring dengan peningkatan hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua blok. ASEAN, sebagai salah satu kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan BRICS, yang terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Tiongkok dan India, memiliki kepentingan bersama dalam memperluas perdagangan dan investasi. Tiongkok, sebagai salah satu anggota BRICS, telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN. Selain itu, India dan Rusia juga memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara ASEAN, terutama dalam bidang teknologi, energi, dan komoditas. Kedua blok ini berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerjasama di sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, serta pertanian, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kawasan masing-masing. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan anggota BRICS seperti Tiongkok, serta partisipasi mereka dalam forum-forum ekonomi internasional, juga memperkuat integrasi ekonomi kedua belah pihak. Dengan kerjasama yang semakin erat, ASEAN dan BRICS mampu meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dan menghadapi tantangan global dengan lebih efektif.

Dalam ekonomi syariah, konsep alat pembayaran merupakan bagian penting yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang

mengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Alat pembayaran merujuk pada segala bentuk sarana yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk uang tunai, instrumen digital, atau aset fisik. Namun, dalam kerangka ekonomi syariah, alat pembayaran harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak hanya mengacu pada fungsi ekonomis, tetapi juga pada aspek moral dan keadilan sesuai syariah.

Secara umum, dalam ekonomi syariah, alat pembayaran harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Riba dianggap melanggar prinsip keadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa kerja atau risiko yang sah, sementara gharar dan maysir mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian yang dilarang. Karena itu, alat pembayaran yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip ini agar transaksi yang terjadi bersifat adil dan seimbang, serta tidak merugikan salah satu pihak (Chapra, 1985).

Secara historis, Islam mengenal alat pembayaran dalam bentuk uang logam seperti dinar (emas) dan dirham (perak), yang dianggap memiliki nilai intrinsik yang stabil. Uang logam ini tidak hanya dipandang sebagai medium pertukaran, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penggunaan dinar dan dirham dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah karena nilai emas dan perak cenderung stabil dan tidak dipengaruhi oleh inflasi atau kebijakan moneter yang tidak adil (Khan, 1984). Dengan demikian, kedua mata uang ini menjadi model ideal dalam ekonomi syariah klasik.

Namun, dengan berkembangnya zaman dan globalisasi, konsep alat pembayaran dalam ekonomi syariah pun mengalami penyesuaian. Di era modern,

alat pembayaran yang digunakan tidak hanya terbatas pada uang tunai atau logam mulia, tetapi juga mencakup alat pembayaran elektronik seperti kartu debit, kartu kredit syariah, dan e-wallet. Alat pembayaran modern ini diatur sedemikian rupa agar tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kartu kredit syariah menggunakan akad qardh (pinjaman tanpa bunga) atau akad ijarah (sewa) untuk menghindari unsur riba. Dalam hal ini, bank syariah atau lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit tidak mengenakan bunga atas transaksi, tetapi memperoleh keuntungan melalui biaya administrasi atau jasa tertentu (Al-Gamal, 2006).

Mata uang emas, seperti dinar, memiliki peran penting dalam ekonomi syariah karena dianggap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, stabilitas, dan nilai intrinsik yang tidak dimiliki oleh mata uang fiat modern. Dalam ekonomi syariah, penggunaan mata uang emas dan perak diakui sebagai instrumen pembayaran yang sah karena bebas dari unsur riba (bunga), spekulasi, dan inflasi yang sering mempengaruhi nilai mata uang fiat. Emas, sebagai mata uang, tidak hanya memiliki nilai yang stabil secara global, tetapi juga diakui secara syariah sebagai alat tukar yang adil karena nilainya tidak mudah terpengaruh oleh kebijakan moneter atau gejolak ekonomi. Penggunaan dinar emas dalam transaksi syariah sering kali dipandang sebagai upaya untuk kembali kepada sistem moneter yang lebih stabil dan berkeadilan, yang mendukung prinsip utama ekonomi syariah yaitu menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Selain itu, emas memiliki sejarah panjang dalam Islam sebagai alat pertukaran yang sah dan telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai standar nilai yang adil dan stabil (Meera, 2009). Meskipun saat ini mata uang fiat lebih umum digunakan, gagasan untuk

kembali menggunakan dinar emas dalam ekonomi syariah terus menjadi perdebatan di kalangan ekonom Islam sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Potensi mata uang emas sebagai alat pembayaran dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS dapat dilihat sebagai alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat stabilitas keuangan global. Dalam konteks ekonomi syariah, emas memiliki nilai intrinsik yang stabil, menjadikannya alat tukar yang adil dan tahan terhadap inflasi, spekulasi, serta ketidakstabilan pasar, yang sering terjadi pada mata uang fiat. Teori keunggulan komparatif juga dapat mendukung penggunaan emas dalam perdagangan internasional antara ASEAN dan BRICS, di mana setiap negara memaksimalkan potensi keunggulan mereka dalam memproduksi komoditas dengan nilai emas yang stabil. Dengan demikian, penggunaan dinar emas atau emas dalam bentuk lain dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan efisien di antara negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti emas di Afrika Selatan dan Tiongkok.

Keunggulan lain dari penggunaan mata uang emas adalah mengurangi ketergantungan pada fluktuasi nilai tukar mata uang fiat, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. ASEAN dan BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang, akan mendapatkan manfaat dari stabilitas harga emas, terutama dalam transaksi perdagangan komoditas dan infrastruktur yang bernilai tinggi. Penggunaan emas sebagai alat tukar dalam perdagangan antarblok ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi regional dari guncangan eksternal yang dipicu oleh kebijakan ekonomi negara maju (Meera, 2009). Di samping itu, emas

sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada perdagangan yang bebas dari riba dan gharar, sehingga dapat menjadi model alternatif yang lebih berkelanjutan untuk kerjasama ekonomi antara ASEAN dan BRICS.

Negara-negara ASEAN memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan mata uang emas atau mata uang regional dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS. Salah satu organisasi penting yang dapat memainkan peran kunci dalam mendukung inisiatif ini adalah ASEAN Economic Community (AEC), yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi di kawasan ASEAN. AEC, sebagai salah satu pilar utama ASEAN, telah berhasil meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya, mendorong perdagangan bebas, serta menghapus berbagai hambatan tarif dan non-tarif. AEC juga mendorong pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, dan investasi di kawasan, yang membuatnya sangat relevan dalam mendukung implementasi kebijakan mata uang regional.

Selain AEC, ASEAN Free Trade Area (AFTA) juga memainkan peran signifikan dalam memperkuat perdagangan intra-ASEAN melalui penghapusan tarif di antara negara-negara anggota. AFTA telah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan volume perdagangan di kawasan, dengan penurunan tarif yang mendorong ekspor dan impor antar anggota ASEAN. Melalui mekanisme perdagangan bebas ini, negara-negara ASEAN telah menunjukkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dalam mengatasi hambatan perdagangan, yang memberikan landasan bagi kemungkinan implementasi mata uang regional untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan BRICS.

Data menunjukkan bahwa perdagangan intra-ASEAN terus tumbuh seiring dengan implementasi kebijakan AEC dan AFTA. Menurut laporan ASEAN Secretariat, perdagangan intra-ASEAN mencapai lebih dari 22,5% dari total perdagangan eksternal ASEAN pada tahun 2020, dan nilai perdagangan barang antar anggota ASEAN melebihi USD 600 miliar pada tahun tersebut (ASEAN Secretariat, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut telah berhasil meningkatkan integrasi dan volume perdagangan antarnegara di kawasan.

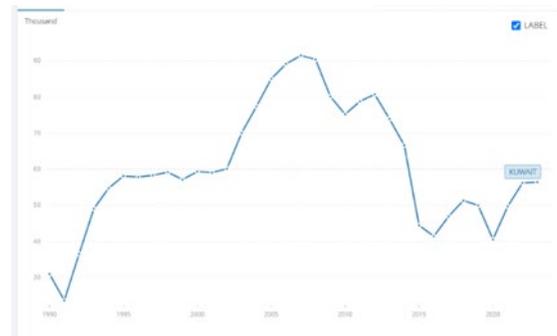
Untuk mendukung kebijakan penggunaan mata uang regional, ASEAN dapat memanfaatkan struktur yang sudah ada di bawah AEC dan AFTA, serta memperkuat koordinasi dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), yang berperan dalam stabilitas keuangan regional. AMRO memiliki kapasitas untuk memfasilitasi pengawasan dan koordinasi kebijakan ekonomi dan moneter di ASEAN, sehingga organisasi ini dapat berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan mata uang regional yang didukung oleh emas atau mata uang lainnya.

Dengan dukungan dari organisasi-organisasi ini, negara-negara ASEAN memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terpadu dalam perdagangan dengan BRICS. Melalui integrasi lebih lanjut dan penerapan mata uang regional, ASEAN dapat memperkuat posisi mereka dalam perdagangan global dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, yang dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS serta meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan. Kolaborasi ini akan membawa manfaat besar bagi kedua blok, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global.

Penerapan mata uang berbasis emas, seperti dinar, dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS dapat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan politik di kawasan ASEAN. Emas memiliki stabilitas nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang fiat, karena nilainya tidak mudah terpengaruh oleh inflasi, fluktuasi pasar, atau kebijakan moneter yang tidak menentu. Penggunaan emas sebagai dasar mata uang akan memberikan jaminan nilai yang lebih aman dan stabil bagi negara-negara ASEAN, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks perdagangan internasional, ini akan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar AS, yang sering kali menjadi sumber instabilitas ekonomi karena pergerakannya yang fluktuatif dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Salah satu contoh nyata keberhasilan penggunaan dinar dalam mendukung stabilitas ekonomi adalah Kuwait. Negara ini menggunakan dinar Kuwait (KWD), yang merupakan salah satu mata uang tertinggi di dunia dalam hal nilai tukar terhadap dolar AS. Dinar Kuwait memiliki stabilitas yang luar biasa, didukung oleh cadangan emas yang kuat dan ekonomi berbasis minyak yang kokoh. Kuwait berhasil menjaga stabilitas ekonominya melalui pengelolaan kebijakan moneter yang ketat, serta ketergantungan rendah pada utang luar negeri, yang didukung oleh nilai dinar yang kuat. Pada 2023, Kuwait memiliki GDP per kapita yang sangat tinggi, yaitu sekitar USD 56.386, menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan ukuran ini (World Bank, 2024). Keberhasilan Kuwait dalam mempertahankan nilai mata uangnya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil

menunjukkan potensi penerapan mata uang berbasis emas di ASEAN untuk memperkuat stabilitas ekonomi.



Gambar 1. GDP Kuwait

Sumber Gambar (World Bank, 2024)

Di ASEAN, jika negara-negara anggota mengadopsi mata uang regional berbasis emas atau dinar, mereka dapat belajar dari kesuksesan Kuwait dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang berbasis pada nilai intrinsik emas. Hal ini tidak hanya akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil di dalam kawasan, tetapi juga meningkatkan stabilitas politik karena negara-negara ASEAN tidak lagi rentan terhadap gejolak nilai tukar mata uang asing yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan mata uang berbasis emas akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan di kancah global, serta memperkuat hubungan politik yang lebih harmonis di antara negara-negara anggota.

Penerapan kebijakan ini juga akan berkontribusi pada ketahanan ekonomi regional dalam menghadapi tantangan global seperti krisis keuangan, yang sering kali mempengaruhi negara-negara dengan mata uang fiat. Dengan demikian, stabilitas ekonomi yang dicapai melalui penggunaan mata uang emas akan mendukung kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan

memperkuat daya tahan politik di kawasan ASEAN, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai.

SIMPULAN

Penerapan mata uang emas, seperti dinar, memiliki potensi yang signifikan untuk diimplementasikan di ASEAN dalam rangka memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS. Melalui forum-forum ekonomi ASEAN yang sudah ada, seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), negara-negara anggota dapat mulai mensosialisasikan penggunaan mata uang emas sebagai alat pembayaran alternatif. Hal ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, tetapi juga menciptakan stabilitas nilai tukar yang lebih berkelanjutan. Mata uang berbasis emas memiliki nilai intrinsik yang stabil dan terbukti mampu menjaga kekuatan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam keberhasilan Kuwait yang menggunakan dinar emasnya. Dalam jangka panjang, stabilitas ini akan menguntungkan ASEAN dan BRICS karena keduanya akan memiliki sistem keuangan yang lebih adil dan lebih tahan terhadap fluktuasi pasar global.

Penerapan mata uang emas sebagai alat tukar dalam perdagangan antara ASEAN dan BRICS juga memiliki implikasi besar bagi stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan stabilitas ekonomi yang tercipta melalui penggunaan mata uang emas, ASEAN dapat memperkuat ketahanan ekonomi regional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis keuangan atau perubahan nilai tukar yang tidak menentu. Selain itu, stabilitas ekonomi ini akan memberikan efek berkelanjutan terhadap stabilitas dan keamanan regional, karena negara-negara di ASEAN akan lebih sedikit terpengaruh oleh ketidakstabilan eksternal yang disebabkan oleh perubahan kebijakan

ekonomi negara-negara maju. Dengan mata uang emas sebagai alat tukar yang stabil dan adil, ASEAN dan BRICS dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih kuat, meningkatkan daya saing ekonomi mereka di panggung global, serta memperkuat integrasi politik yang harmonis di kawasan masing-masing. Pada akhirnya, kolaborasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di kedua blok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. Cambridge University Press.

Balassa, B. (2013). *The Theory of Economic Integration (Routledge Revivals)*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203805183>

Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2022). *BOOK The Economics of European Integration 7e (7th ed.)*. McGraw Hill.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Brics Portal. (2024). <https://infobrics.org/> Brics ASEAN Chamber of Commerce. (2024). BRICS-ASEAN Chamber of Commerce We serve as a bridge between BRICS and ASEAN countries. Retrived from: <https://www.bricsasean.org/>

Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

El-Agraa, A. M. (2011). *The European Union: Economics and Policies (9th ed.)*. Cambridge University Press.

Grauwe, P. De. (2020). Economics of the Monetary Union (13th ed.). Oxford University Press.

Khan, M. A. (1984). Islamic Economics: Nature and Need. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1(2), 5. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3118130

KLEIN, M. C., & PETTIS, M. (2020). Trade Wars Are Class Wars. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv10sm96m>

Meera, A. K. M. (2009). Gold dinar: the next component in Islamic economics, banking and finance. IIUM Press.

Pranoto, M. A., & Hendrajit. (2017). Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru.

Sandelowski, M. (2000). Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing and Health, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240x\(200008\)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g](https://doi.org/10.1002/1098-240x(200008)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g)

Shambaugh, D. (2013). China Goes Global: The Partial Power. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2016). The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe. W. W. Norton & Company.

World Bank. (2024). GDP per capita, PPP (current international \$) – Kuwait. Retrieved from: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=KW>
Ketentuan umum penulisan daftar pustaka: